

BAB SATU

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Diskriminasi merupakan sebuah permasalahan pelik hampir di seluruh negara dan Indonesia adalah salah satunya. Sejak zaman penjajahan, pasca kemerdekaan sampai kepada keberadaannya di masa kini, Indonesia sebagai negara kesatuan cenderung sangat mudah digoncangkan oleh isu diskriminasi. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat pluralis. Keragaman tersebut meliputi suku bangsa, agama, ras, dan kebudayaan. Meskipun ikrar Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan membentuk semangat kesatuan dengan semboyannya, “Bhinneka Tunggal Ika – meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua,” namun hal itu tidak dapat menghindarkan pertikaian dan gesekan-gesekan yang sering terjadi di dalam masyarakat.

Jika menelisik ke dalam sejarah diskriminasi di Indonesia, pada tahun 1849 Belanda mengenalkan kebijakan segregasi hukum perdata, *Indische Staatregeling* yang diterapkan mulai tahun 1926. Kebijakan ini mengatur pembagian golongan di hadapan hukum, yakni pemisahan antara golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputra atau Pribumi.¹ Zaman kemerdekaan hingga Orde Baru berlaku pula kewajiban untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau biasa disingkat SBKRI bagi warga keturunan Tionghoa. Kepemilikan SKBRI adalah

1. Ayu Purwaningsih, “Diskriminasi di Sekitar Kita,” *DW: Made for Minds*, 21 Maret 2016, <http://www.dw.com/id/diskriminasi-di-sekitar-kita/a-19122533> (diakses 31 Oktober 2017).

salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, dan lain-lain.²

Akhir era Orde Baru, kasus diskriminasi rasial yang menonjol terjadi pada Mei 1998, di mana aksi-aksi kekerasan di berbagai kota besar Indonesia telah memakan banyak korban dari para warga keturunan Tionghoa. Isu-isu diskriminasi juga masih dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu di masa kini, misalnya dalam masa pemilihan kepala daerah. Media sosial juga berperan menyebarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang identitas atau latar belakang seperti agama dan etnis atau ras dari seseorang atau suatu kelompok, dengan tujuan untuk menjatuhkan pihak tersebut.³

Berbagai kasus diskriminasi diberitakan dalam berbagai surat kabar, salah satunya Harian Kompas yang pernah mencatat lima kasus diskriminasi terparah di Indonesia. Kompas memublikasikan data dari hasil penelitian Yayasan Denny K. A, yaitu setidaknya terjadi 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, diantaranya 65% karena berlatar belakang agama, 20% karena masalah etnis, 15% karena gender dan 5% dikarenakan kekerasan berorientasi seksual.⁴ Konflik Ambon berada di posisi teratas, kemudian diikuti konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998, pengungsian Ahmadiyah di Mataram dan konflik Lampung Selatan.⁵

2. Purwaningsih, "Diskriminasi di Sekitar Kita," (diakses 31 Oktober 2017).

3. Purwaningsih, "Diskriminasi di Sekitar Kita," (diakses 31 Oktober 2017).

4. Sabrina Asril, "Lima Kasus Diskriminasi Terburuk di Pasca Reformasi," *Kompas*, 23 Desember 2012, kolom Nasional, <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/23/15154962/Lima.Kasus.Diskriminasi.Terburuk.Pasca.reformasi> (diakses 31 Oktober 2017).

5. Asril, "Lima Kasus Diskriminasi Terburuk di Pasca Reformasi," *Kompas* (diakses 31 Oktober 2017).

Diskriminasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya,”⁶ sedangkan diskriminatif merupakan sifat dari membeda-bedakan itu sendiri. Theodorson dan Theodorson menjelaskan diskriminasi adalah:⁷

“Perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.”

UNESCO memberikan pengertian yang lebih luas, di mana diskriminasi adalah:⁸

“Pilihan untuk memperlakukan secara tidak menguntungkan terhadap seseorang atau orang-orang berdasarkan jenis kelamin ras, warna kulit, etnis, asal negara, agama, kecacatan, orientasi seksual, kelas sosial, usia (sesuai dengan konvensi pada umumnya saat pensiun), pernikahan status atau tanggung jawab keluarga atau sebagai akibat dari kondisi atau persyaratan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keadilan alam.”

Diskriminasi mengacu pada sebuah proses yang selalu berkaitan dengan pembedaan, memihak pada satu hal dan mengabaikan hal lainnya. Diskriminasi juga sering dianggap tindakan ketidakadilan, karena umumnya membuat kaum dominan selalu menekan kaum minoritas. Diskriminasi juga kian menjamur karena terkait dengan nilai individualisme dan materialisme yang semakin subur dipegang oleh masyarakat, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta berbagai bentuk korupsi yang telah merasuki seluruh sendi kehidupan.⁹ Diskriminasi bahkan

6. Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “Diskriminasi.”

7. George A. Theodorson dan Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology* (New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books, 1979), 115-6.

8. UNESCO, “Discrimination,” *Learning Live Together*, 2017, kolom Social and Human Sciences: International Migration, <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination> (diakses 31 Oktober 2017).

9. Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang, “Refleksi tentang Pendidikan di Indonesia Saat Ini,”

semakin signifikan terjadi karena perbedaan-perbedaan di antara kelompok berbeda tidak pernah didialogkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat mengenai sesamanya. Dampaknya sikap saling berprasangka semakin meluas dan melahirkan stigma-stigma yang salah atau keliru, sehingga melekat di dalam pemikiran antarmasyarakat di Indonesia.

Diskriminasi sendiri menjangkiti berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dunia pendidikan. Padahal pendidikan seharusnya menjadi sebuah sarana untuk mentransformasi kehidupan seseorang agar memiliki pemahaman, sikap, perilaku yang menuju karakter yang semakin baik dan berwawasan terbuka terhadap perbedaan. Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu seharusnya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan kesadaran, ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia dengan perjuangan, memelihara hidup ke arah kemajuan dan usaha kebudayaan berazaskan keadaban agar mempertinggi derajat kemanusiaan.¹⁰ Nilai-nilai luhur yang memajukan dan mengembangkan kebudayaan ke arah mempertinggi derajat kemanusiaan, dapat dipahami juga dengan sikap-sikap yang tidak mengotak-ngotakkan tatanan kehidupan untuk memperoleh hak yang sama dalam proses perubahan.

Faktanya Pendidikan di Indonesia yang seharusnya meminimalisir tindakan diskriminatif, justru terpapar dengan praktik-praktik diskriminasi. Misalnya dengan penerapan sistem rayon yang tidak merata, sistem kebijakan sekolah yang mendiskriminasi siswa beragama atau beretnis minoritas, pembatasan akses

Suara Kristen (23 Mei 2016), <http://www.suarakristen.com/2016/05/23/refleksi-tentang-gereja-dan-pendidikan-di-indonesia-saat-ini> (diakses 20 Oktober 2017).

10. Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa, 2011), 165-66.

pendidikan bagi kaum miskin, biaya pendidikan sekolah yang semakin mahal, rendahnya mutu atau kualitas guru dan sebagainya – yang selebihnya akan dipaparkan secara rinci di dalam bab dua.

Secara keseluruhan, setiap tahun berbagai program pendidikan diusulkan dan dilaksanakan dalam rangka mengupayakan kebutuhan setiap manusia Indonesia agar dapat mengecap pendidikan dengan merata. Namun kenyataannya, sistem pendidikan di Indonesia sendiri masih berjuang menghadapi dampak diskriminasi yang telah laten di dalam kehidupan masyarakat, bahkan memengaruhi kinerjanya dalam mengupayakan transformasi bagi masyarakat. Ironisnya, dari seluruh benang kusut mengenai diskriminasi yang memapari pendidikan Indonesia adalah dampaknya terhadap pendidikan di sekolah Kristen.

Idealnya, Pendidikan Kristen mengemban misi Allah untuk menyatakan *shalom* di tengah dunia. Pendidikan Kristen sebagaimana dikutip oleh B. Samuel Sidjabat dari Robert W. Pazmino, sederhananya berarti suatu upaya sengaja dan sistematis untuk meneruskan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, keterampilan serta tingkah laku yang selaras atau konsisten dengan iman Kristen. Pendidikan Kristen juga bertujuan untuk menghadirkan perubahan, pembaharuan dan reformasi secara individu, kelompok bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus agar hidup bergantung kepada kehendak Allah di dalam Alkitab dan terutama di dalam Yesus Kristus.¹¹ Begitu juga pandangan yang dikemukakan oleh Nicholas

11. B. Samuel Sidjabat, *Strategi Pendidikan Kristen* (Yogyakarta: ANDI, 1994), 28.

Wolterstorff, bahwa pendidikan Kristen yang mendasar dipengaruhi oleh tiga dimensi panggilan bagi umat Allah, yakni:¹²

“Pertama, mereka dipanggil untuk memberitakan Injil; kedua mereka dipanggil untuk bekerja demi damai sejahtera (*shalom*) dan demi pembebasan dari segala sesuatu yang menindas dan menekan; dan ketiga mereka dipanggil untuk menyaksikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka.”

Akan tetapi, realitanya sekolah Kristen belum mampu membentuk kepribadian para siswa untuk memiliki semangat *shalom* yang terkristalisasi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, pengetahuan dan pemahaman afeksi terhadap pengajaran *shalom* yang seharusnya terimplementasi dalam kehidupan nyata dan khususnya dimulai dari sekolah Kristen, belum terlaksana sepenuhnya.

Memang tidak dapat dipungkiri sekolah-sekolah Kristen di Indonesia masih bergulat pula terhadap tantangan secara internal, jika ingin mempertahankan keberadaannya dalam mengemban misi Allah sebagai lembaga alternatif pendidikan yang memiliki keunikannya sendiri.¹³ Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang dalam *Refleksi Tentang Gereja dan Pendidikan di Indonesia Saat Ini* dalam Konsultasi Gereja dan Pendidikan Nasional, adalah sebuah tugas untuk terus-menerus merefleksikan pola dan bentuk-bentuk partisipasi gereja yang relevan – khususnya melalui pendidikan Kristen dalam wujud institusi sekolah – bagi upaya mencerdaskan siswa di tengah

12. Nicholas P. Wolterstorff, *Mendidik untuk Kehidupan* (Surabaya: Momentum, 2014), 49.

13. Weinata Sairin, “Misi dan Visi Sekolah Kristen dalam Masyarakat Majemuk Indonesia yang Sedang Membangun,” dalam *Identitas dan Ciri Pendidikan Kristen di Indonesia*, ed. Weinata Sairin (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2000), 116-17. Tantangan internal yang dimaksud berkaitan dengan penyediaan SDM, pengorganisasian, keragaman denominasi gereja di Indonesia yang perlu menyepakati bahwa pendidikan Kristen berdasarkan kepada dua aspek penting, yakni tindakan kesaksian, pelayanan serta bentuk partisipasi dalam pembangunan sebagai manifestasi rasa sukacita dari Tuhan; dan upaya melawan sikap *Minority Complex*.

masyarakat Indonesia yang majemuk dan sangat cepat mengalami pergeseran nilai yang cukup signifikan.¹⁴

Maka dari itu melalui penelitian ini, diperlukan suatu kajian teologis mengenai peran pendidikan Kristen serta implementasinya di dalam sekolah Kristen, supaya dapat memperbaiki fungsi dan tugasnya dalam menangkal permasalahan diskriminasi. Kajian teologis mengenai peran pendidikan Kristen di Indonesia kemudian diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman dan upaya implementasi yang strategis untuk sekolah-sekolah Kristen. Hal ini bertujuan supaya menimalisir bahkan menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi, dengan menghasilkan praksis-praksis penerapan pendidikan yang tidak diskriminatif.

Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Kehidupan masyarakat di Indonesia masih sangat rentan dengan isu diskriminasi. Perbedaan latar belakang di tengah masyarakat seperti suku, ras dan agama yang tidak saling dikomunikasikan atau didialogkan dengan baik, kerap menimbulkan asumsi-asumsi atau prasangka yang membentuk sentimen negatif. Fenomena tersebut juga merambah ke lembaga pendidikan, bahkan sekolah Kristen. Perbedaan atau diskriminasi yang terjadi pada akhirnya berdampak negatif terhadap hak siswa untuk dapat mengalami pembelajaran yang mentransformasi hidupnya.

14. Hutabarat-Lebang, "Refleksi tentang Pendidikan di Indonesia Saat Ini," *Suara Kristen* (diakses 20 Oktober 2017).

2. Pendidikan Kristen sesungguhnya mengemban misi Allah untuk menyatakan *shalom* kepada semua orang, yang diimplementasikan melalui Sekolah Kristen. Namun, meninjau dari berbagai fenomena diskriminasi di Indonesia, sekolah Kristen tampak belum sepenuhnya mampu mengkristalisasikan semangat *shalom* dalam hidup para siswanya, supaya menangkal sikap-sikap diskriminatif. Maka dari itu, diperlukan suatu kajian teologis mengenai peran pendidikan Kristen supaya dapat memperbaiki fungsinya dalam pendidikan hingga menyentuh kepada permasalahan diskriminasi di tengah masyarakat.
3. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu pemahaman dan implementasi yang strategis bagi sekolah Kristen, supaya pendidikan yang dilakukan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diskriminasi. Solusi yang diharapkan ialah menghasilkan prinsip-prinsip pendidikan di sekolah yang tidak diskriminatif.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Memaparkan permasalahan diskriminasi di tengah masyarakat Indonesia dan permasalahan pendidikan yang justru membuat masalah diskriminasi semakin meningkat, bahkan di sekolah Kristen.
2. Memaparkan konsep teologis mengenai Pendidikan Kristen dalam upaya menemukan orientasi pendidikan yang mampu mengatasi masalah diskriminasi.

3. Menjelaskan pemahaman atau upaya implementasi strategis pendidikan Kristen sebagai agen perubahan di tengah masyarakat yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip dan praksis-praksis yang tidak diskriminatif dalam ruang lingkup sekolah Kristen.

Pembatasan Penulisan

Penelitian ini tidak berusaha untuk membuat tinjauan tentang pembuatan kurikulum pendidikan Kristen yang hendak menjawab masalah diskriminasi. Meskipun memiliki irisan yang besar dengan pendidikan multikultural, namun penelitian ini tidak akan membahas topik tersebut. Penelitian ini hanya berorientasi khusus membahas diskriminasi dalam dunia pendidikan Kristen dan memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip yang melahirkan praksis-praksis untuk menghapus diskriminasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah Kristen.

Metodologi Penulisan

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui studi literatur atau kepustakaan. Adapun yang menjadi referensi yang menunjang penulisan yaitu buku, kamus, buku elektronik, jurnal, media informasi cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan topik penulisan.

Sistematika Penulisan

Penjabaran sistematika penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta terarah, adalah sebagai berikut: Bab Satu akan menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, batasan penulisan, metodologi penulisan serta sistematika penulisan. Bab Dua akan membahas permasalahan diskriminasi di tengah masyarakat, khususnya di dalam dunia pendidikan termasuk sekolah Kristen, yang seharusnya mengantisipasi permasalahan diskriminasi itu sendiri. Bab Tiga akan membahas tentang konsep teologis mengenai pendidikan Kristen untuk memberikan orientasi pendidikan yang mampu mengatasi masalah-masalah diskriminasi, khususnya di sekolah Kristen itu sendiri. Bab Empat akan memaparkan implementasi strategis Pendidikan Kristen yang diterapkan dalam bentuk-bentuk praksis yang tidak diskriminatif. Bab Lima akan memaparkan kesimpulan.